SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN SEWA MENYEWA PERALATAN antara WIKA-CAKRA KSO deng an CV. MITRA IDOLA

Nomor : TP. 01.01 / SPP-ALAT/ WISMA ATLET / 0012 / WIKA-CAKRA KSO / VII / 2016

Pada hari ini **Senin** tanggal **d u a p u l u h l i m a** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Enam Belas** (25-07-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

I. WIKA-CAKRA KSO **:** Berkedudukan di Jl. DI Panjaitan Kav.9 Lt.7.DBG RT.003 RW.011 Cipinang Cempedak Jati Negara Jakarta Timur DKI Jakarta . Dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek WIKA-CAKRA KSO, yang selanjutnya Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. CV. MITRA IDOLA **:** Berkedudukan di Jl. Kranggan Pasar No. 113 Jatisampurna – Bekasi 17433 Telp: (021) 8430 9540. Dalam hal ini diwakili oleh **Syahroni** Selaku Pemasok CV. Mitra Idola, yang Selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat mengadakan perjanjian dalam transaksi yang mengikat berdasarkan :

1. Surat Penawaran tanggal 20 April 2016.
2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Sewa Alat tanggal 3 Mei 2016.
3. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Sewa Alat tanggal 13 Mei 2016.
4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Sewa Alat tanggal 8 Juni 2016.

Dan berjanji akan melaksanakan ketentuan – ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL
1

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA menyewakan *Concrete Pump* sesuai dengan pasal 2 Kontrak ini kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu sesuai dengan pasal 3 untuk keperluan pekerjaan di lokasi seperti disebutkan pasal.

PASAL
2
JENIS DAN JUMLAH
PERALATAN

Alat yang dimaksud dalam pasal 1 ini adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Spesifikasi / Type	Jumlah	Sat	No Polisi	Status
1.	Concrete Pump	Standart Boom (21 M)	1	Unit	B 9536 TIN	Aktif
2.			1		B 9071 TIN	Aktif
3.	Concrete Pump	Standart Boom (21 M)	1	Unit	B 9129 TIA	Aktif
4.	Concrete Pump	Standart Boom (21 M)	1	Unit	-	Aktif
5.			1		-	Standby
	Concrete Pump	Long Boom		Unit		
	Conrete Pump	Standart Boom (21 M)		Unit		

Alat tersebut haruslah dalam kondisi yang siap digunakan untuk pekerjaan PIHAK KESATU.

PASAL
3
JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

(a) Volume penyewaan Alat ini adalah 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus) m3 (kubik) sejak Alat tersebut mulai beroperasi di lokasi pekerjaan PIHAK KESATU dan berakhir pada saat Alat tersebut sampai di lokasi Pool PIHAK KESATU.

(b) Volume pelaksanaan penyewaan *Concrete Pump* pada subpasal (a) ini bisa diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak. Perpanjangan harus diberitahukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua paling lambat 3 (Tiga) hari sebelum berakhirnya jangka waktu seperti subpasal (a) atau perpanjangan waktu pelaksanaan penyewaan seperti disebutkan pasal ini. Dalam waktu 7 hari setelah menerima

pemberitahuan dari Pihak Pertama, Pihak Kedua harus memberikan persetujuan atau ketidak setujuan kepada PIHAK KESATU.

(c) Apabila persetujuan diberikan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA harus memberikan addendum Kontrak tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan penyewaan

(d) PIHAK KEDUA harus sudah siap dilokasi PIHAK KESATU 6 (enam) jam sebelum dimulai nya pekerjaan.

PASAL 4 HARGA

(a) Harga kontrak pelaksanaan penyewaan Alat ini adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Spesifikasi	Vol	Sat	Harsat per m3	Total Harga
1.	Concrete Pump	5 Unit	Standart & Long Boom	7.500	m3	Rp 20.000	Rp 150.000.000
						SUB-TOTAL	**Rp 150.000.000**
						PPN 10%	**Rp 15.000.000**
						GRAND TOTAL	**Rp 165.000.000**

Terbilang # Seratus Enam Puluh Lima Puluh Lima Juta Rupiah #

(b) Harga tersebut pada subpasal (a) ini sudah termasuk biaya perawatan dan atau perbaikan Alat, over head, keuntungan dan PPH.
(c) Alat yang harus didatangkan oleh PIHAK KEDUA ke lokasi kerja PIHAK KESATU adalah 5 unit, terdiri atas 4 unit aktif bekerja dan 1 unit standby. PIHAK KESATU hanya berkewajiban membayar 4 unit dan tidak berkewajiban membayar 1 unit yang standby.
(d) Setiap Mobil Concrete Pump akan dilengkapi oleh 1 tim yang terdiri dari 4 orang *crew.*
(e) Selama pelaksanaan, Insentif sebesar Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) akan diberikan oleh PIHAK KESATU untuk setiap 8 (delapan) jam kerja. Insentif hanya diberikan kepada 4 (empat) tim saja.
(f) PIHAK KEDUA wajib menyediakan *Safety Officer* minimal 1 Orang yang bertanggung-jawab atas fungsi K3 bagi PIHAK KEDUA. Jika PIHAK KEDUA tidak menyediakan *safety officer*, maka akan dikenakan denda oleh PIHAK KESATU.
(g) Selama pelaksanaan, PIHAK KEDUA wajib membawa sendiri serta mengenakan Alat Pelindung Diri. Alat Pelindung Diri tersebut berupa Helm safety, rompi safety, sepatu safety serta peralatan lain yang sekiranya termasuk kedalam perlengkapan K3.
(h) Penambahan pipa Concrete Pump tidak dikenakan biaya tambahan.
(i) Harga tersebut sudah termasuk BBM Solar dan uang makan operator.
(j) Harga tersebut akan mengalami perubahan jika terjadi perubahan aturan, undang-undang, kebijakan moneter dan kebijakan pemerintah lainnya.

(k) Harga diatas sudah termasuk **Mobilisasi** dan **Demobilisasi.**
(l) Harga tersebut diatas belum termasuk biaya ppn 10%.
(m) Harga diatas belum termasuk potongan PPh.

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

(a) Tanpa Uang Muka
(b) Pembayaran dilakukan dengan berdasarkan kepada bukti pemakaian alat / time site.
(c) Pembayaran dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan cara Konvensional 45 hari setelah berkas tagihan atau invoice masuk ke bagian keuangan PIHAK KESATU serta dilampirkan kwitansi bermaterai Rp.6.000 dari PIHAK KEDUA.

PASAL 6
LOKASI PENGOPERASIAN ALAT

(a) Concrete Pump di-operasikan di lokasi Proyek **WIKA – CAKRA KSO**.
(b) PIHAK KESATU tidak boleh mengoperasikan dan atau memindahkan Alat di luar Lokasi tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban PIHAK KESATU :

a. Membayar sewa Concrete Pump sesuai dengan harga seperti tersebut pada pasal 4 dan dengan cara seperti tersebut pada pasal 5 Kontrak ini.
b. Menjamin keamanan dan keselamatan Alat selama berada di Lokasi.
c. Menciptakan lingkungan bagi pengoperasian Alat sedemikian rupa sehingga Alat biasa dioperasikan secara aman dan selamat.

Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. Menyediakan alat seperti disebutkan di pasal 1.
b. Melakukan pemeliharaan Alat, sehingga selalu dalam kondisi siap untuk digunakan .
c. Menyediakan mekanik/teknisi untuk alat yang digunakan.
d. Apabila alat sering terjadi kerusakan maka akan diganti dengan Unit yang lainnya.

PASAL 8 DENDA DAN SANKSI

(a) Apabila PIHAK KESATU terlambat dalam melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA maka sesuai Pasal 5 (c) maka PIHAK KESATU dikenakan denda berupa bunga sebesar 0.1% per hari terhadap nilai pembayaran yang belum dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

(b) Apabila PIHAK KEDUA mengirimkan Alat tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Kontrak ini maka PIHAK KESATU berhak menolak Alat tersebut dan Pihak Kedua wajib mengganti dengan Alat yang sesuai dengan Kontrak. Segala risiko biaya yang muncul karena penolakan oleh PIHAK KESATU adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 9 KERUSAKAN DAN ALAT CADANGAN

(a) Apabila karena kesalahan PIHAK KESATU, Alat seperti tersebut dalam pasal 2 Kontrak ini mengalami kerusakan maka PIHAK KESATU harus memperbaiki kerusakan tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KESATU, kecuali jika kerusakan bukan disebabkan oleh kesalahan PIHAK KESATU maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kerusakan tersebut.

(b) Jika dipandang perlu maka PIHAK KEDUA akan menyediakan alat cadangan untuk persiapan jika terjadi kerusakan alat, dimana jika tidak terjadi kerusakan alat maka pemakaian Alat cadangan dianggap sebagai sewa, dengan harga yang sama dengan alat yang sejenis.
(c) Jika alat mengalami kerusakan sehingga tidak dapat beroperasi maka PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA tidak boleh saling mengklaim haknya selama waktu kerusakan.
(d) Asuransi Alat menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 10 FORCE MAJEURE

(a) Force majeure berarti suatu peristiwa apapun yang berada di luar kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang menyebabkan pelaksanaan Kontrak ini menjadi terhalang atau tertunda, baik secara langsung atau tak langsung, yaitu :

(i) Bencana alam, termasuk gempa bumi, erupsi volkanik, angin topan, badai, banjir atau kebakaran
(ii) Kerusuhan, kekacauan masyarakat, kegiatan teroris, revolusi, pemberontakan, sabotase.
(iii) Perang atau permusuhan, baik diumumkan atau tidak.
(iv) Tidak bisa dipakainya prasarana/sarana berikut, atau pemakaiannya menjadi tertunda oleh sebab-sebab abnormal yaitu prasarana/sarana kereta api, pelabuhan, pelabuhan udara, jasa pengiriman atau cara-cara transportasi lain, atau disebabkan oleh embargo pengankutan/pengiriman barang.
(v) Pemogokan atau pemblokiran atau tindakan industrial lain yang
(vi) Tindakan-tindakan Pemerintah dan atau institusi pemerintah.

(b) Apabila oleh dan disebabkan terjadinya suatu peristiwa Force Majeure, baik PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan atau tertunda dalam melaksanakan Kontrak ini atau suatu kewajiban yang merupakan bagian daripadanya, maka pihak yang bersangkutan harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa Force Majeure dengan penjelasan tentang terjadinya peristiwa tersebut yang bisa diakui sebagai peristiwa Force Majeure disertai dengan bukti dan menjelaskan dengan cara bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini.

(c) Dengan adanya kejadian force majeure terebut maka PIHAK KESATU tidak bisa menuntut ganti rugi apapun terhadap PIHAK KEDUA, demikian juga sebaliknya.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(a) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang timbul atas Perjanjian ini akan diselesaiakan secara musyawarah dalam waktu 30 hari kerja.
(b) Apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaiakan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang berselisih, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

(c) Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan pada pasal 2 perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 12 PEMUTUSAN KONTRAK

(a) Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban seperti dimaksud dalam kontrak ini, tanpa alasan yang bisa diterima oleh PIHAK KEDUA atau melakukan pelanggaran Kontrak ini atau jika menurut pendapat PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai kontrak, maka PIHAK KEDUA berhak untuk memutuskan Kontrak ini secara sepihak. Pemutusan ini akan diberitahukan secara tertulis oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

(b) Apabila terjadi pemutusan Kontrak seperti pada ayat 1 diatas, Pihak Pertama tetap harus menyelesaiakan kewajibannya untuk membayar semua biaya seperti tersebut dalam pasal 7 Kontrak ini termasuk biaya pemulangan Alat.

PASAL 13 AMANDEMEN/ ADDENDUM

Penambahan dan atau perubahan terhadap isi Kontrak ini hanya berlaku mengikat bagi Para Pihak jika dibuat secara tertulis, disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak yang ditetapkan di dalam suatu amandemen/addendum dari Kontrak ini, serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

PASAL 14 LAIN-LAIN

(a) Kontrak ini dinyatakan sah dan mengikat Para Pihak dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

(b) Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai Kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

CV. MITRA IDOLA

PIHAK KESATU
WIKA-CAKRA
KSO
Proyek Pembangunan Rumah Susun
Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran
Blok D10-3

Syahroni
Pemasok

Daryanto
Manajer Proyek

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA